

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Skolastika Bunga Aryani¹, Cahyani Nuswandari²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang^{1,2}

¹skolastikabunga7003@mhs.unisbank.ac.id, ²cahyani@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the effect of local revenue—comprising local taxes, regional levies, separated regional wealth management results, and other legitimate local revenues—on the financial performance of local governments, as measured by the regional financial independence ratio. The research utilizes secondary data in the form of panel data obtained from the Budget Realization Reports of 35 regencies/cities in Central Java Province for the 2020–2024 period. The entire population was included in the sample, utilizing a census method for data collection. Research data were analyzed using the panel data regression technique. The results indicate that local taxes, regional levies, separated regional wealth management results, and other legitimate local revenues have a positive and significant effect on local government financial performance. These findings demonstrate that the optimization of all local revenue components is directly proportional to the improvement of local government financial performance.

Keywords : *local taxes, regional levies, separated regional wealth management results, other legitimate local revenues, financial performance of local governments*

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dinilai dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Seluruh anggota populasi merupakan sampel sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus. Analisis data penelitian menggunakan teknik regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi seluruh komponen pendapatan asli daerah berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : *pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, kinerja keuangan pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan amanat dari agenda reformasi yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki keuntungan dari pelaksanaan otonomi daerah karena memiliki kewenangan

untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga pelaksanaan otonomi daerah mencerminkan bagian dari kemandirian keuangan pemerintah daerah (Novianti & Ishak, 2022). Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah juga menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pemerintah daerah, terutama dalam hal mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, pemerintah daerah dituntut menjadi daerah yang memiliki kemandirian atas keuangannya sehingga dapat mewujudkan tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Dewantoro, 2022).

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah (Mahmudi, 2016). Kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dari kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai secara mandiri aktivitas-aktivitas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan (Saputra et al., 2025). Tingginya rasio kemandirian daerah menggambarkan pemerintah daerah tersebut berhasil menggali potensi ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dari PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat komponen dari PAD tersebut merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pelaksanaan pembangunan di daerah (Mardiasmo, 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki peran penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah yang memiliki kontribusi besar pada PAD di wilayahnya cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena rasio kemandirian keuangan daerahnya mengalami peningkatan. Hal ini turut dipengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap PAD, salah satunya adalah pajak daerah. Semakin tinggi persentase partisipasi masyarakat yang membayar pajak, maka akan semakin tinggi pula persentase tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Ullo et al., 2023). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang memiliki PAD relatif rendah dan bergantung dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kusuma & Anwar, 2023). Ketergantungan tersebut dapat berdampak pada fleksibilitas fiskal daerah sehingga menghambat pembangunan daerah. Di sisi lain, kemandirian keuangan pemerintah daerah juga tidak dapat dipukul rata karena masing-masing daerah memiliki karakteristik ekonomi yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD yang ada di wilayahnya.

Pajak daerah, sebagai sumber utama dari pendapatan daerah memiliki peran yang penting untuk mendukung kemandirian fiskal daerah karena pajak daerah merupakan komponen pendapatan daerah yang menjadi penentu besar kecilnya PAD. Semakin besar pajak daerah yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka

semakin kecil pula ketergantungan suatu daerah untuk mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sehingga kemandirian keuangan daerah dapat dinilai dari hal tersebut (Dewantoro, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) dan Syahril et al., (2023) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Amal (2020) dan Deswita (2024) menyatakan bahwa peningkatan pajak daerah tidak berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan kepada masyarakat. Peningkatan retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah yang artinya retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap kapasitas fiskal daerah sehingga dapat membantu menjalankan pelayanan dan pembangunan daerah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) dan Syahril et al. (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunarto & Sunyoto (2016) dan Novianti & Ishak (2022) memiliki hasil yang bertolak belakang, yaitu retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD), contohnya berupa dividen, bagian laba, maupun hasil kerja sama yang berkaitan dengan investasi daerah. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang berada dalam wilayahnya. Dengan demikian, apabila pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan dengan baik dan menghasilkan imbal hasil yang baik maka dapat memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinilai dari kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril et al. (2023) menyatakan bahwa hasil kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, beberapa penelitian menyatakan hasil yang bertolak belakang, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmadani et al. (2024) dan Indiraswari (2024) memiliki hasil bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga memiliki andil terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Syahril et al. (2023) menyimpulkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah walaupun Verawaty et al. (2017) dan Saputra et al. (2025) menyimpulkan kondisi yang berbeda, yaitu lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing komponen dari pendapatan asli daerah, khususnya untuk melihat sejauh mana PAD mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang tercermin melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2024 yang datanya bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah karena jumlah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah cukup besar sehingga dapat menyediakan data yang lebih beragam. Selain itu, kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan PAD yang cukup tinggi setiap daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi perekonomian yang heterogen berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing daerah. Adanya perbedaan tersebut memberikan peluang analisis sehingga hasil analisisnya dapat memperlihatkan perbedaan kemampuan fiskal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini di pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota pada tahun 2020-2024. Seluruh anggota populasi merupakan sampel dengan jumlah 175 sampel karena metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus. Data penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini merupakan data panel. Data panel merupakan gabungan data *cross-section* dan *time-series*. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinilai dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari seluruh komponen PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Apabila diikhtisarkan, maka definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| No | Variabel | Definisi Operasional | Pengukuran | Referensi |
|----|------------------|---|---|-----------------|
| 1 | Kinerja Keuangan | Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinilai dari Rasio | $KKPD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Transfer}}$ | (Mahmudi, 2016) |

| No | Variabel | Definisi Operasional | Pengukuran | Referensi |
|----|---|--|--|---------------------------------------|
| | Pemerintah Daerah | Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah | Pusat + Provinsi + Pinjaman) × 100% | |
| 2 | Pajak Daerah | Jumlah realisasi pajak daerah daerah | PD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah | (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) |
| 3 | Retribusi Daerah | Jumlah realisasi retribusi daerah | RD = Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah | (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) |
| 4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Jumlah realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | HPKDD = Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) |
| 5 | Lain-lain PAD yang Sah | Jumlah realisasi lain-lain PAD yang sah | LLPADS = Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif perlu dilakukan sebelum uji hipotesis karena informasi yang diperoleh dari hasil analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian. Berikut hasil analisis statistik deskriptif sebagaimana tertuang dalam tabel 2.

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

| | KKP D (%) | PD (Rupiah) | RD (Rupiah) | HPKDD (Rupiah) | LLPADS (Rupiah) |
|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Mean | 27,4 | 189.441.125. 357 | 63.221.872. 206 | 20.360.093. 010 | 200.027.660 .498 |
| Standard Deviation | 15,9 | 286.680.315. 612 | 100.429.727 .442 | 16.175.691. 897 | 116.325.739 .055 |
| Minimum | 11,9 | 35.958.686.5 31 | 5.319.316.3 32 | 1.745.238.2 77 | 4.018.629.1 80 |

| | KKP D (%) | PD (Rupiah) | RD (Rupiah) | HPKDD (Rupiah) | LLPADS (Rupiah) |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Maximum | 111,8 | 2.196.946.31 | 539.634.310 | 98.214.926. | 777.428.723 |
| Observations | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinilai dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024 masih memiliki ketergantungan tinggi pada dana dari pemerintah pusat, provinsi, maupun dana pinjaman. Hal tersebut digambarkan dari rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah memiliki persentase sebesar 24,7%. Variabel independen menunjukkan bahwa Kota Semarang mendominasi nominal pendapatan tertinggi karena ia merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang mendominasi pendapatan terendah mayoritas berasal dari wilayah geografis kecil seperti Kota Magelang. Namun, Kabupaten Blora meraih posisi pertama untuk pendapatan tertinggi pada variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi sektor sumber daya alam dan energi melalui penanaman saham pada badan usaha milik daerah. Perbedaan perolehan di setiap wilayah secara umum dipengaruhi oleh potensi ekonomi lokal, kondisi geografis, serta luas wilayah pada masing-masing kota dan kabupaten (Zasriati, 2022).

Analisis Data

Bagian ini menguraikan hasil analisis data yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Prosedur analisis dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahapan utama. Pertama, pemilihan model regresi berganda yang dilakukan dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier* sehingga dapat dipilih model yang paling tepat diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik karena uji ini merupakan syarat statistik yang wajib dipenuhi supaya model dapat diandalkan sebagai alat estimasi. Setelah itu, dilakukan Uji Model untuk menilai apakah model penelitian sudah layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Terakhir, dilakukan Uji Hipotesis atau Uji Statistik t yang berfungsi untuk membuktikan secara empiris hubungan antar variabel sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis penelitian ini.

Pemilihan Model Regresi Berganda

Pendekatan model regresi berganda dengan data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Model tersebut dipilih setelah dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil Uji Chow, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* karena nilai probabilitas pada *cross-section F* dan *cross-section Chi-square* yang lebih kecil

dari 0,05 sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 87.265440 | (34,136) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 547.308619 | 34 | 0.0000 |

Fixed Effect Model perlu dilakukan pengujian kembali dengan Uji Hausman untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berdasarkan hasil Uji Hausman, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* karena memenuhi kriteria nilai probabilitas $> 0,05$ dengan hasil uji sebagaimana disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 4.171894 | 4 | 0.3832 |

Cross-section random effects test comparisons:

| Variable | Fixed | Random | Var(Diff.) | Prob. |
|----------|----------|----------|------------|--------|
| X1 | 0.053635 | 0.069763 | 0.000076 | 0.0638 |
| X2 | 0.020766 | 0.019882 | 0.000001 | 0.4454 |
| X3 | 0.013803 | 0.014939 | 0.000001 | 0.2399 |
| X4 | 0.021130 | 0.022222 | 0.000001 | 0.3217 |

Pada tahap awal pengujian dengan Uji Chow, *Common Effect Model* tidak memasuki kriteria sehingga tidak perlu melakukan Uji *Lagrange Multiplier* yang berfungsi untuk menilai model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik diperlukan untuk memastikan bahwa data panel yang akan diteliti telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Sehubungan dengan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dan model yang terpilih adalah *Random Effect Model*, maka diperlukan untuk melakukan dua pengujian, sebagai berikut.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel. Menurut Ghozali & Ratmono (2017), kriteria apabila suatu model penelitian terjadi multikolinieritas adalah apabila nilai korelasi antar variabel $> 0,90$.

Tabel 5 Uji Multikolinieritas

| | X1 | X2 | X3 | X4 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|
| X1 | 1.000000 | 0.464392 | 0.245386 | 0.032881 |
| X2 | 0.464392 | 1.000000 | 0.255904 | -0.771618 |
| X3 | 0.245386 | 0.255904 | 1.000000 | -0.098346 |
| X4 | 0.032881 | -0.771618 | -0.098346 | 1.000000 |

Hasil korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai korelasi di bawah 0,90 sebagaimana tersaji pada tabel 5, yang artinya tidak terindikasi terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas

Sehubungan dengan model penelitian yang terpilih adalah *Random Effect Model*, maka pengujian heteroskedasitas tidak diperlukan karena *Random Effect Model* diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS)* yang telah mengakomodasi perbedaan varians error.

Uji Model

Model penelitian yang terpilih berdasarkan pengujian sebelumnya adalah *Random Effect Model* dengan hasil pengujian regresi berganda sebagaimana tersaji pada tabel 6.

Tabel 6 *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/10/26 Time: 12:44
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 175
 Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -2.914247 | 0.494453 | -5.893880 | 0.0000 |
| X1 | 0.069763 | 0.016999 | 4.103873 | 0.0001 |
| X2 | 0.019882 | 0.008227 | 2.416576 | 0.0167 |
| X3 | 0.014939 | 0.004774 | 3.129280 | 0.0021 |
| X4 | 0.022222 | 0.007236 | 3.070907 | 0.0025 |

| Effects Specification | | S.D. | Rho |
|-----------------------|--|----------|--------|
| Cross-section random | | 0.130085 | 0.9505 |
| Idiosyncratic random | | 0.029677 | 0.0495 |

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.241668 | Mean dependent var | 0.027818 |
| Adjusted R-squared | 0.223825 | S.D. dependent var | 0.033703 |
| S.E. of regression | 0.029692 | Sum squared resid | 0.149878 |
| F-statistic | 13.54403 | Durbin-Watson stat | 1.711766 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

| Unweighted Statistics | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.323922 | Mean dependent var | 0.274074 |
| Sum squared resid | 2.973881 | Durbin-Watson stat | 0.086270 |

Model Regresi Berganda

Persamaan model regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk

mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun rumusan model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = -2,914 + 0,069 PD + 0,019 RD + 0,014 HPKDD + 0,022 LLPADS + e_i$$

Keterangan:

| | |
|--------|--|
| Y | : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah |
| PD | : Pajak Daerah |
| RD | : Retribusi Daerah |
| HPKDD | : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan |
| LLPADS | : Lain-Lain PAD yang Sah |
| e_i | : <i>Error Term</i> |

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dilihat dari *adjusted R square* yang memiliki nilai 0,223825 yang artinya sekitar 22,38% variasi variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. Sedangkan 77,62% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai *adjusted R square* yang relatif tidak besar mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang masih terbatas dalam menjelaskan variabel dependen sehingga masih diperlukan variabel lain di luar model penelitian untuk menjelaskan variasi tersebut.

Uji Statistik F

Hasil uji statistik F berdasarkan hasil uji pada tabel 6 yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000000 yang artinya masuk dalam kriteria nilai signifikansi < 0,05 sehingga model penelitian memenuhi kriteria untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

Uji Statistik t

Langkah selanjutnya setelah dilakukan Uji Model adalah melakukan Uji Statistik t atau disebut juga dengan istilah Uji Hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinilai dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, yang dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hasil Uji Statistik t dirangkum pada tabel 7.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik t

| Variabel | Koefisien Regresi | Signifikansi | Arah Hipotesis | Kesimpulan |
|----------|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| PD | 0,069763 | 0,0001 < 0,05 | Positif | H1 diterima |

| | | | | |
|--------|----------|---------------|---------|-------------|
| RD | 0,019882 | 0,0167 < 0,05 | Positif | H2 diterima |
| HPKDD | 0,014939 | 0,0021 < 0,05 | Positif | H3 diterima |
| LLPADS | 0,022222 | 0,0025 < 0,05 | Positif | H4 diterima |

Seluruh variabel independen menunjukkan hasil bahwa ia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi setiap variabel yang lebih kecil dari 0,05 serta koefisien regresi yang bernilai positif, sehingga seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Pembahasan

Berikut merupakan ulasan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pada variabel pertama menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana peningkatan penerimaannya terbukti mampu menekan ketergantungan pada dana transfer pusat, provinsi, dan pinjaman daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pajak daerah berperan vital sebagai instrumen pembiayaan pembangunan dan layanan publik secara independen, selaras dengan hasil penelitian Dewantoro (2022) dan Syahril et al. (2023). Dengan demikian, optimalisasi pemungutan pajak yang efektif menjadi kunci dalam memperkuat validitas temuan ini serta mendukung keberlanjutan stabilitas keuangan pemerintah kabupaten/kota.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, di mana optimalisasi pungutan ini berperan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah tanpa ketergantungan pihak eksternal. Temuan ini menegaskan bahwa semakin besar kontribusi retribusi, semakin meningkat pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri, sejalan dengan hasil penelitian Dewantoro (2022) dan Syahril et al. (2023). Konsistensi hasil ini memperkuat validitas penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan rasio kemandirian keuangan sebagai cerminan kinerja keuangan daerah yang sehat.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa deviden atau penerimaan dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan dampak

nyata dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian Syahril et al. (2023), yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara optimal berkontribusi langsung pada penguatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis terakhir menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya variabel ini memiliki andil dalam meningkatkan rasio kemandirian fiskal. Meskipun kontribusinya tidak sebesar pajak daerah, keberadaannya tetap krusial sebagai komponen pendukung pendapatan asli daerah, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian Syahril et al. (2023). Temuan ini menegaskan bahwa setiap sumber penerimaan yang sah tetap memiliki peran penting dalam memperkuat struktur keuangan pemerintah kabupaten/kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi potensi pendapatan asli daerah merupakan kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal. Dengan kemandirian fiskal yang kuat, pemerintah daerah dapat maksimal dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta mempercepat pencapaian tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten maupun kota secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang serta memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika potensi kemandirian fiskal daerah, terdapat beberapa saran strategis bagi peneliti selanjutnya. Pertama, peneliti berikutnya sangat disarankan untuk menambah variabel independen lainnya mengingat nilai *Adjusted R-Square* dalam penelitian ini baru mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 22,38%. Dengan adanya variabel lain di luar model, diharapkan variabel penelitian lainnya dapat menjelaskan variabel dependen yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Kedua, pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek ke tingkat nasional atau memperpanjang periode pengamatan agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan validitas yang lebih kuat dalam jangka panjang. Terakhir, untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam dan komprehensif, penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan terkait. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih jauh kendala teknis, regulasi, serta tantangan riil yang dihadapi setiap pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah secara efektif di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Deswita, R. Y. (2024). Analisis Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 715–727.
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indiraswari, S. D. (2024). Determination of Local Own-Source Revenue (PAD) in Districts and Cities across East Java Province in 2020-2021. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 4(2), 221–231. <https://doi.org/10.38142/jtep.v4i2.1072>
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2023). Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 223–233.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250.
- Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 21(2), 162–179. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i1.6514>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Saputra, E., Sastrawan, R., & Patria, A. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 10(1), 97–106.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Dharma Ekonomi*, 43(23), 13–22.
- Syahril, M., DM, R., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(4), 680–690. <http://repository.upi.edu/id/eprint/34450>
- Ullo, F., Kakisina, C. S., & Hartati, Y. S. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 54–60. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.223>
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 3 (2026) 1525 - 1537 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i3.11355

Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 1-10.

Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Tahun 2010-2020. *E-Journal Al Dzahab*, 3(2), 119-131.